

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu permasalahan yang menjadi penghalang untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat adalah kemiskinan. Kemiskinan termasuk masalah dengan begitu kompleks serta kronis. Kemiskinan bukan hanya diartikan pada tidak mampu dalam hal perekonomian saja, namun tentang gagal terpenuhinya berbagai hak dasarnya seperti halnya pendidikan, kesehatan, dan perbedaan perlakuan dalam menjalani kehidupan yang bermartabat (Manurung, 2015: 1). Kemiskinan telah menjadi persoalan utama yang menghambat pembangunan nasional dan menjadi faktor penentu kemajuan negaranya (Wirawan, dkk., 2015: 1). Di Indonesia permasalahan mengenai kemiskinan juga masih terus terjadi. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) total penduduknya yang tergolong miskin di Indonesia di tahun 2020 menggapai 26, 42 juta orang. Jumlah tersebut hadapi peningkatan sebanyak 1, 63 juta jiwa dari keseluruhan populasinya dibandingkan pada tahun 2019. Dipaparkan pula jika presentase peningkatan kemiskinan di pedesaan jauh lebih besar dari kemiskinan perkotaan. Kemiskinan di pedesaan senantiasa menggapai presentase diatas 12 persen, sebaliknya di perkotaan cuma pada kisaran 7 persen. BPS mencatat sejak Maret 2020 persentase penduduknya yang tergolong miskin pada daerah pedesaan menghadapi peningkatan hingga mencapai 12, 82 persen dibandingkan pada September 2019 di tingkat 12, 60 persen. Hal tersebut menandakan bahwa di Indonesia, penduduk miskinnya kebanyakan berada di desa. Suyanto menjelaskan bahwa kemiskinan di daerah pedesaan di Indonesia telah jadi isu yang berkelanjutan

diawali sejak akhir masa Orde Barutahun 1997, dimana keadaan ekonomi nasional memburuk (Niko, 2019: 61). Permasalahan mengenai kondisi tersebut di desa telah menjadi permasalahan pokok yang cukup mengganggu keterlaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Menurut UU No 6 Tahun 2014 desa yaitu dengan intisari yakni kesatuan masyarakat hukumnyadimana memiliki batas wilayah yang memiliki wewenangdalam mengatur serta mengurus persoalan terkait pemerintah, apa yang menjadi kepentingan masyarakatnya sesuai prakarsa yang dikemukakan, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diberikan pengakuan sertamendapat penghormatanpada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disebut dengan desa. Adapun menurut Pasal 1 Ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014 mengenai desa dijelaskan terkait kegiatan menyelenggarakan urusan pemerintah maupun kepentingan masyarakatnya pada pemerintahan NKRI.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang penduduknya banyak masuk dalam kategori miskin. Pada bulan September tahun 2020, total penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 4, 12 juta orang (Badan Pusat Statistik) dimana angka tersebut mengalami kenaikan dibanding pada bulan Maret yang sejumlah 139,03.000 orang. Dari angka tersebut, angka kemiskinan perdesaan di Jawa tengah ternyata juga mengalami kenaikan sebanyak 2,23 juta orang pada bulan September 2020 dari 2,18 juta orang pada bulan Maret 2020. Berkaitan dengan hal tersebut, Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah juga tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan yang diderita oleh masyarakat setempatnya terutama yang tinggal di desa. Pada tahun 2018 Kabupaten Wonosobo mendudukiurutan pertama dengan jumlah penduduk miskinnya paling banyak pada

Provinsi Jawa Tengah dengan persentasenya sebesar 17,58 persen (Sunandar, wonosobo.sorot.com, 2019). Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Wonosobo banyak terjadi di perdesaaan. Hal ini mengacu pada laporan tahunan kinerja desa periode tahun sebelumnya dan berdasar atas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menerangkan bahwa kondisi zona merah kemiskinan Kabupaten Wonosobo terakumulasi di desa (radarsemarang.jawapos.com, 2019). Mengingat masih tingginya angka kemiskinan di perdesaan, Eko Purnomo selaku Bupati Kabupaten Wonosobo mengatakan jika Kepala Desa baru periode 2019 – 2025 harus lebih fokus tangani masalah kemiskinan secara terintegrasi dan berkelanjutan (radarsemarang.jawapos.com, 2019). Sejatinya Pemerintah Kabupaten Wonosobo sejak lama telah melakukan berbagai kebijakan yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan kemiskinan baik dengan adanya program berjangka panjang maupun program berjangka pendek seperti halnya pemberdayaan desa, mendorong investasi dan pengembangan potensi perdesaan. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2018 terkait dengan “Percepatan Penanggulangan Kemiskinan” juga menjadi salah satu bukti usaha adanya perhatian terhadap permasalahan kemiskinan. Pada tahun 2020, Bupati Wonosobo melakukan pendekatan berbasis inovasi dalam mengatasi berbagai permasalahan termasuk kemiskinan perdesaan. Pemerintah Kabupaten Wonosobo berusaha merubah tema pembangunan daerah dengan meningkatkan mutu pelayanan publik yang basisnya kabupaten pintar guna memantapkan ekonomi wilayah Kabupaten Wonosobo (magelangekspres.com, 2019). Sepanjang Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengalokasikan bantuan keuangan Desa hingga mencapai mencapai lebih dari 62 Miliar Rupiah, atau tepatnya 62,18 Miliar Rupiah

dengan perantara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk 219 kegiatan di Kabupaten Wonosobo (MC Kab. Wonosobo, 2020). Pemerintah desa seharusnya mampu mengoptimalkan dana tersebut untuk dapat meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Namun, berbagai program dan kebijakan tersebut nyatanya belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan perdesaan di Kabupaten Wonosobo.

Desa Purwosari yang terletak di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo termasuk desa dimana masih mengalami ketertinggalan sebagai akibat kemiskinan yang masih cukup tinggi. Untuk dapat menentukan suatu desa dikatakan mengalami kemiskinan bisa menggunakan kriteria pengukuran kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) yang memakai suatu pendekatan karakteristik rumah tangga melalui 14 variabel kualitatif penjelas terhadap kondisi kemiskinan, diantaranya: jenis lantai, luas lantai per kapita, jenis dinding, sumber air minum, fasilitas buang air besar, sumber penerangan, pembelian ayam/daging/susu, bahan bakar, frekuensi makan, kemampuan untuk berobat, membeli pakaian baru, pendidikan kepala rumah tangga, lapangan usaha kepala rumah tangga, serta aset yang dimiliki. Mengacu pada pengukuran kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) pada PPLS 2008 Pemerintah Desa Purwosari melakukan pemetaan kesejahteraan lokal Desa Purwosari tahun 2018 dengan menggunakan 16 indikator, diantaranya: pekerjaan, pendapatan, kepemilikan lahan, alat transportasi, kepemilikan rumah, kesehatan, pendidikan, usaha, sanitasi rumah, kepemilikan ternak, kepemilikan aset berharga, tabungan, energi masak, difabel ataupun cacat, asupan gizi, serta hutang yang diperoleh dengan adanya musyawarah desa yang menyertakan keterlibatan

semua elemen masyarakatnya dengan tidak ada pengecualian apapun (RPJMDesa Purwosari 2019-2024). Hasil pemetaan membagi masyarakat menjadi beberapa kriteria yaitu :

- a. Pra Sejahtera ialah keadaan ekonomi dalam rumah tangganya tergolong keluarga dengan sangat miskin.
- b. Sejahtera 1 (satu) ialah rumah tangga yang tergolong keluarga dengan kategori miskin.
- c. Sejahtera 2 (dua) ialah rumah tangga dimana dianggap sanggup untuk mencukupi kebutuhan dasar hidupnya ataupun tergolong keluarga sedang.
- d. Sejahtera Plus ialah rumah tangga dimana tergolong keluarga kaya (RPJMDesa Purwosari 2019-2024).

Tercatat bahwa dari seluruh total 447 KK atau jumlah rumah tangga pada tahun 2018, total rumah tangga dengan kategori pra-sejahtera mencapai 11%, dengan kategori sejahtera 1 (satu) sebanyak 45%, dengan kategori sejahtera 2 (dua) sebanyak 36%, sementara dengan kategori sejahtera plus hanya mencapai 8%. Angka ini menunjukkan bahwa kemiskinan hampir mendominasi kehidupan masyarakat di Desa Purwosari. Sebab presentase masyarakat sangat miskin dan miskin jika digabung mencapai angka 56% yang berarti separuh lebih dari masyarakat desa purwosari belum memenuhi kebutuhan dasar hidup. Kemudian, pada tahun 2019 memang angka kesejahteraan di Desa Purwosari mengalami kenaikan, namun belum cukup optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel Profil Tingkat Perkembangan Desa Purwosari tahun 2019.

Tabel 1.1

Tabel Tingkat Perkembangan Desa Purwosari tahun 2019

Tingkat Kesejahteraan	Jumlah
Pra sejahtera	30 Keluarga
Sejahtera 1	132 Keluarga
Sejahtera 2	240 Keluarga
Sejahtera 3 plus	15 Keluarga
Jumlah KK	417

Sumber. Profil Tingkat Perkembangan Desa Purwosari tahun 2019.

Tabel 2.3 diatas menunjukkan bahwa dari seluruh total 417 KK atau jumlah rumah tangga pada tahun 2019 dengan kategori pra sejahtera (keluarga sangat miskin) sejumlah 30 keluarga, rumah tangga dengan kategori sejahtera 1 (miskin) sebanyak 132 keluarga, rumah tangga sejahtera 2 (mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup atau sedang) sebanyak 240 keluarga, sedangkan rumah tangga dengan kategori sejahtera 3 plus (keluarga kaya) hanya mencapai 15 keluarga (Profil Tingkat Perkembangan Desa Purwosari tahun 2019). Angka ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih terjadi di Desa Purwosari. Sebab presentase masyarakat sangat miskin dan miskin jika digabung masih mencapai 162 keluarga atau sejumlah 39%. Masyarakat dengan kategori sedang mencapai 240 keluarga yang mana mengalami kenaikan dari tahun 2018 akan tetapi, jumlah keluarga sejahtera 3 plus atau kaya hanya sejumlah 15 keluarga saja, padahal di tahun 2018 mencapai 34 keluarga. Catatan tingkat kesejahteraan di tahun 2020 juga tidak mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel Profil Tingkat Perkembangan Desa Purwosari tahun 2020.

Tabel 1.2

Tabel Tingkat Perkembangan Desa Purwosari tahun 2020

Tingkat Kesejahteraan	Jumlah
Pra sejahtera	29 Keluarga
Sejahtera 1	144 Keluarga
Sejahtera 2	248 Keluarga
Sejahtera 3 plus	17 Keluarga
Jumlah KK	438

Sumber. Profil Tingkat Perkembangan Desa Purwosari tahun 2020

Tabel 2.4 diatas menunjukan bahwa keluarga miskin di Desa Purwosari mengalami penurunan dari tahun 2019, namun jumlahnya masih cukup kecil. Masyarakat yang mampu keluar dari tingkat pra sejahtera (keluarga sangat miskin) menuju Sejahtera 1 dari 2019 saja hanya 1 keluarga. Presentase masyarakat sangat miskin dan miskin masih mencapai 173 keluarga dari total 438 KK. Oleh sebab itu, sampai pada tahun 2021 Desa Purwosari masih perlu diperhatikan dengan serius terkait tingkat kesejahteraannya sehingga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan. Di Desa Purwosari, dusun yang mengalami angka kemiskinan tertinggi ada pada Dusun Bugangan, yang mana pada tahun 2020 dari jumlah keluarga 260, sejumlah 240 warga masih masuk dalam keluarga yang membutuhkan bantuan sosial (Profil Tingkat Perkembangan Desa Purwosari tahun 2020). Belum lagi tercatat di tahun 2020 sejumlah 168 rumah tangganya dari keseluruhan 504 total rumah tangga pada Desa Purwosari terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), termasuk didalamnya sejumlah 97 masyarakat juga terdaftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal ini menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat di Desa Purwosari masih cukup rendah. Sebagai desa yang memiliki

fenomena dengan persentase angka kemiskinan yang sampai saat ini masih cukup tinggi, maka perihal yang begitu menarik sertadiperlukan penelitian. Angka kesejahteraan yang rendah di Desa Purwosari tentu memiliki berbagai aspek faktor penyebab. Faktor- faktor penyebab kemiskinan di Desa Purwosari perlu dianalisis supaya diketahui akar permasalahannya dan bisa mencari solusi.

Faktor penyebab kemiskinan bisa disebabkan oleh faktor struktural, faktor kultural, faktor geografis, hingga peran institusi/ lembaga. Menurut Kartasmita, dalam Nurwati (2008: 5) pada umumnya faktor penyebabnya mencakup : tingkat pendidikan serta derajat kesehatan yang masih rendah, lapangan pekerjaan yang terbatas, serta keadaan yang terisolasi. Kemudian, Yusuf dan Sumner menjelaskan bahwa faktor utama yang dapat meningkatkan kemiskinan yaitu terdapat peningkatan harga bahan bakarnya serta naiknya harga makanan pokoknya contohnya beras, sebab hal tersebut akan berdampak pada ketidakmampuan daya beli masyarakat (Sunu dan Made Suyana, 2019: 853). Dari penjelasan tersebut, ternyata faktor penyebab kemiskinan cukup beragam. Oleh sebab itu, peneliti akan mencoba untuk menggali lebih dalam akar penyebab dari kemiskinan perdesaan yang terjadi di Desa Purwosari.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Merujuk pada latar belakang yang sudah diuraikan tersebut, maka bisadiberikan rumusan masalahnya yakni :

1. Faktor- faktor apa saja sebagai penyebab terjadinya kemiskinan di Desa Purwosari Kabupaten Wonosobo?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilakukannya penelitian antara lain:

1. Menganalisis berbagai faktor penyebab tingginya tingkat kemiskinan di Desa Purwosari Kabupaten Wonosobo dari perspektif demokrasi sosial.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Terdapat dua manfaat pada penelitian diantaranya :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Ditinjau dari manfaat teoritisnya, harapannya penelitian ini bisa memperluas pengetahuan serta wawasan terkait kemiskinan desa terkhusus berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan yang ada di desa. Harapannya hasil penelitian bisa dijadikan untuk literatur ataupun acuan bagi seseorang yang hendak melakukan pengkajian berkaitan dengan kemiskinan desa terkhusus berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan yang ada di desa sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Ditinjau dari manfaat praktisnya, harapannya hasil penelitian dapat sebagai masukan serta menyediakan sumbangsih untuk bahan pertimbangan bagi pemerintahan desa, khususnya di Desa Purwosari dalam upaya mengentaskan permasalahan kemiskinan desa. Di samping hal tersebut, harapannya penelitian ini dapat menyediakan tambahan informasi serta pemahaman masyarakatnya terkait faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan yang ada di desa

dengan demikian masyarakatnya bisa berkolaborasi bersama Pemerintah Desa Purwosari pada upaya mengatasi faktor penyebab tingginya tingkat kemiskinan di desa tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi dan semangat mahasiswa atau mahasiswi dari Kabupaten Wonosobo untuk mau melakukan penelitian di daerahnya sendiri. Sehingga dapat melihat permasalahan dan dapat bersama-sama mencoba memberikan saran dan solusi terbaiknya.

1.5 TINJAUAN LITERATUR

Penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan untuk melaksanakan penelitian dengan begitu mampu memperluas teori yang dipergunakan pada pengkajian penelitian. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Di Desa Purwosari Kabupaten Wonosobo belum ada yang mengkaji. Namun telah terdapat hasil karya yang dinilai relevan, dengan perbedaannya pada objek pengkajiannya. Penulis merujuk beberapa riset relevan sebagian untuk dipergunakan sebagai acuan guna menambah bahan kajian dalam penelitian.

1. “Karakteristik dan Fenomena Kemiskinan Keluarga Miskin Pedesaan Di Aceh” oleh Arfriani Maifizar (2016). Riset dilaksanakan terhadap masyarakat di Gampong Suak serta Gampong Cot Kumbang dengan menggunakan metode kualitatif, adapun teknik dalam menarik sampelnya yakni *purposive sampling*. Hasilnya menunjukkan ditemukannya karakteristik beserta kejadian yang menjadi penyebab kemiskinan masyarakat pada kedua wilayah tersebut seperti relokasi masyarakatnya ke daerah baru yang kondisi alamnya tidak memiliki potensi untuk melakukan pengembangan dalam perekonomian rumah tangganya yang mengakibatkan banyaknya

kaum ibu banyak yang pengangguran, akses transportasi yang jauh lokasi dalam mencari nafkahnya, pemberdayaan masyarakat yang dinilai gagal oleh Pemerintah maupun LSMnya sebagai akibat pelaksanaan pemberdayaan hanya untuk menjalankan program semata, serta ketergantungan masyarakatnya secara berlebih pada pemerintahan.

2. “Studi Faktor- Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna” oleh Cica Sartika, M.Yani Balaka, serta Wali Aya Rumbia (2016). Metode penelitian menggunakan purposive sampling dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penduduk miskin di Desa Lohia disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: usia produktif, jumlah anggota keluarga yang lebih banyak, pendidikan serta keterampilan yang rendah, pendapatan yang rendah, dan faktor-faktor produksi dan etos kerja yang rendah. Diketahui yakni mayoritas penduduk miskinnya di Desa Lohia mempunyai total tanggungannya yang relatif banyak hingga empat jiwa, tetapi masing-masing keluarganya hanya satu orang yang bekerja. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan total tanggungan terhadap tingkat penghasilan keluarganya. Rendahnya pendapatan perkapita tersebut faktor penyebab kemiskinan di Desa Lohia. Disamping itu, masyarakat di Desa Lohia dalam bekerja masih menggunakan peralatan yang sangat sederhana dalam pertanian, hal ini mengakibatkan ketidakefektifan dalam mengelola hasil pertanian. Kemudian, rendahnya etos kerja juga menjadi pengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat di Desa Lohia, hal tersebut terlihat dari tingkat keterampilan serta pendidikan rendah yang dimiliki masyarakat.

Semakin rendah etos kerjanya seseorang justru semakin rendah pula pendapatannya dan sebaliknya.

3. “Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali” oleh Made Krisna Kalpika Sunu dan Made Suyana Utama (2019). Adapun teknik yang dipakai dalam menganalisis datanya yakni statistik deskriptif dengan *path analysis*. Tujuan dilaksanakan riset yaitu menganalisis pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan serta kesejahteraan masyarakatnya pada kabupaten/kota Provinsi Bali. Hasilnya mengindikasikan dana desa mempunyai suatu pengaruh signifikan serta negatif untuk tingkat kemiskinan artinya semakin tinggi dana desanya maka semakin mengalami penurunan untuk tingkat kemiskinannya. Selanjutnya dana desa memberikan pengaruh signifikan serta positif untuk kesejahteraan masyarakat dimana semakin tingginya dana desa maka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Kemudian tingkat kemiskinan memberikan pengaruh signifikan serta negatif untuk kesejahteraan masyarakat yang manajika tingkat kemiskinan semakin naik kesejahteraan masyarakat akan semakin mengalami penurunan. Variabel *intervening* pengaruh dana desa pada kesejahteraan warga di Kabupaten/Kota disini yakni tingkat kemiskinannya masyarakat Provinsi Bali (Maifizar, 2016).
4. “Pengaruh Umur, Pendidikan, Pekerjaan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Miskin Di Desa Bebandem” oleh Arya Dwiandana Putri dan Nyoman Djinar Setiawina (2013). Penelitian ini memakai metode metode sampling jenuh. Tujuan dari penelitian ini agar diketahu usia, pekerjaan

serta pendidikan yang memberikan pengaruh terhadap tingginya angka kemiskinan yang ada di Desa Bebandem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga elemen tersebut ternyata memberikan pengaruh simultan serta signifikan untuk penghasilan rumah tangga miskin pada desa Bebandem Karangasem. Kemudian, jenis pekerjaan serta pendidikan memberikan pengaruh signifikan serta positif dengan parsial untuk penghasilan rumah tangga miskin, namun usia tidak mempengaruhi didalamnya.

5. “Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan Di Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis” oleh Sri Pajriah dan Aan Suryana (2018). Tujuan dari dilaksanakannya riset untuk mengetahui bagaimana data kemiskinan dan faktor yang menyebabkan munculnya kemiskinan pada Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis dengan memakai pendekatan struktural serta kultural yang menerapkan metode naturalistik. Hasilnya yakni faktor yang menyebabkan kemiskinannya pada Desa Pasirlawang disebabkan faktor struktural serta kultural. Aspek kultural ialah warga miskin yang ada pada desa Pasirlawang tidak mempunyai motivasi secara besar guna menaikkan kesejahteraan keluarga serta sangat tergantung pada dorongan pihak lain. Kemudian, aspek struktural ialah masyarakat miskinnya pada desa Pasirlawang dirasa masih rendah guna melanjutkan pembelajaran pada jenjang lebih tinggi, mayoritas dari masyarakatnya ialah tamatan Sekolah Dasar (SD) yang menyebabkan mereka tidak mempunyai kompetensi buat mencari kerja serta memperoleh pekerjaan yang layak.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat telah ada beberapa program penelitian yang meneliti mengenai faktor- faktor penyebab kemiskinan perdesaan di Indonesia. Penelitian terdahulu tersebut ternyata menunjukkan hasil yang tidak samapada satu daerah terhadap daerah yang lain.Berbagai faktor penyebab kemiskinan cukup beragam, mulai dari pendapatan perkapita yang tidak diimbangi dengan jumlah tanggungan keluarga, rendahnya etos kerja, kondisi geografis yang tidak berpotensi produktif, ketidaktepatan sasaran dari program pemerintah untukmelakukan pemberdayaanmasyarakat miskinnya juga turut menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Selain itu, rendahnya potensi Sumbe Daya Manusia (SDM), tingkat pendidikan masih rendah yang mengakibatkan sulitnya mencari pekerjaan, hingga besarnya dana desa ternyata juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.Dari beragamnya faktor penyebab kemiskinan yang dijelaskan dalam penelitian terdahulu. Peneliti tertatik untuk menganalisis lebih dalam apakah faktor penyebab kemiskinan yang ditemukan oleh penelitian terdahulu ditemukan juga di Desa Purwosari atau justru terdapat faktor penyebab lainnya yang belum terungkap. Kelima penelitian terdahulu tersebut hampir semua membahas faktor penyebab kemiskinan dari sisi struktural dan kultural saja. Sedangkan dalam penelitian saya akan lebih membahas dengan melihat faktor penyebab kemiskinan dari kedua sisi sekaligus yaitu struktural dan institusi/lembaga yaitu bagaimana intervensi pemerintah yang diberikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanganan kemiskinan.

1.6 KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

1.6.1 KONSEP KEMISKINAN

Mengacu pada UU No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah suatu keadaan sosial ekonomi individu ataupun kelompok individu dengan tidak terpenuhinya beberapa hak dasar guna mempertahankan serta mengembangkan kehidupan dengan memiliki martabat yang disebabkan karena kondisi sosial ekonominya disebut kemiskinan. Ellis mengungkapkan terkait kemiskinan yang diartikan dengan suatu konsep dengan berwayuh wajah, bermantra multi-dimensional (Waluyo, 2006: 130-131). Seperti halnya dimensi kemiskinan berkaitan terhadap aspek politik, ekonomi serta sosial-psikologis diantaranya (Waluyo, 2006: 130-131) :

1. Dari sisi ekonominya, kemiskinan bisa diartikan dengan kurangnya suatu sumber daya yang bisa dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup serta tingkatan kesejahteraan kelompok individunya. Sumber energi pada konteks tersebut berkaitan dengan aspek finansialnya serta seluruh tipe dalam makna luas.
2. Kemudian secara politik, ditinjau dari tingkatan aksesnya terhadap suatu kekuasaan (*power*) dimana meliputi berbagai tatanan sistem politik yang dapat memastikan keahlian suatu kelompok individunya guna mencapai serta memakai energinya. Termasuk didalamnya mencakup persoalan mendasar seperti bagaimana menggunakan sumber energi yang terdapat dalam warga, bagaimana warga bisa andil pada membuat suatu keputusan pemakaian sumber daya, serta keahlian berpartisipasi pada berbagai aktivitas bermasyarakat.

3. Dari sisi sosial- psikologisnya mengindikasikan kemiskinan dimana diakibatkan dengan terdapatnya berbagai faktor yang memperlambat seorang dalam menggunakan beberapa kesempatannya untuk kenaikan produktivitas yang terdapat pada masyarakatnya. Berbagai faktor itu mencakup aspek internalnya (dalam diri sendiri serta hambatan budaya) dan aspek eksternal (birokrasi atau peraturan formal yang membatasi seorang dalam menggunakan sumber energi).

Menurut Arsyad, terdapat dua jenis ukuran kemiskinan yang umum dipergunakan yakni kemiskinan relatif serta absolut (Wulandari, 2016)

- 1) Kemiskinan absolut

Yakni bersumber pada tidak mempunya individu yang memadai kebutuhan pokok minimumnya semacam sandang, pangan, perumahan, kesehatan serta pembelajaran dimana dibutuhkan untuk bekerja maupun hidupnya. Kebutuhan disini diartikan dengan dimensi finansial berwujud uang. Kemudian, (Tisniwati, 2012: 35) mengungkapkan bahwa :

“Sebuah kemiskinan dapat diukur dengan menyamakan tingkatan pemasukan masyarakat dengan tingkatan pemasukan yang diperlukan dalam kebutuhan pokok agar bisa menjamin kelangsungan hidupnya.”

Nilai tersebut diketahui dari garis kemiskinannya. Penduduk yang memiliki pendapatan pada bawah garis kemiskinannya tergolong “penduduk miskin” (BPS, 2008).

- 2) Kemiskinan Relatif

Individu yang telah mempunyai tingkatan pemasukan dimana bisa memenuhi kebutuhan dasar minimumnya yang tidak begitu berarti disebut “tidak miskin”. Kemudian, (Tisniwati, 2012: 36) mengungkapkan bahwa :

“Semakin besar ketimpangan antara tingkatan penghidupan kalangan atas serta kalangan dasar, maka terus menjadi besar pula jumlah penduduk yang bisa dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan permasalahan distribusi pemasukan”.

Adanya ahli dengan berkomentar kalau meski pemasukan telah menggapai tingkatan kebutuhan dasar minimumnya, namun masih jauh lebih rendah dibanding kondisi warga pada sekelilingnya, hingga individu itu tetaptergolong dengan kondisi miskin.

Ada terminologi lain dalam kemiskinan yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Adapun kemiskinan struktural diartikan dengan keadaan kemiskinan dimana mencuat sebagai suatu konsekuensi dari struktur sosialnya dengan secara rumit menimbulkan warga yang marjinal serta susah mendapatkan akses untuk bermacam kesempatan (Purwandari, 2011: 27). Kemudian, Effendi menjelaskan bahwa kemiskinan kultural awalnya dicetuskan oleh Oscar Lewis dimana mendapati munculnya kemiskinan disebabkan oleh berbagai nilai maupun kebudayaan dari masyarakat miskinnya (Palikhah, 2016: 11). Lebih lanjut Suparlan mengungkapkan bahwa kebudayaan kemiskinan tersebut selanjutnya mendesak terealisasi berbagai sikap menerima nasibnya, mengharapkan ataupun meminta pertolongan ataupun sedekah dengan sesungguhnya ialah sesuatu wujud menyesuaikan diri secara rasional serta cukup pandai pada upaya menanggulangi kemiskinannya (Palikhah, 2016: 15).

Dari berbagai uraian tentang konsep kemiskinan, dapat dipahami bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi keterbatasan kemampuan dalam memenuhi hak- hak dasar untuk memiliki kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan memberikan kerugian dan menyengsarakan masyarakat. Kemiskinan tidak sebatas mengenaikurangnya uang sebab penghasilannya rendah, namun lebih luas dari hal tersebut. Kemiskinan juga mencakup aspek di luar pendapatan. Kemiskinan merupakan suatu fenomena multidimensi mencakup ekonomi, politik, sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, sumber daya alam, keterampilan, dan psikologi. Dari berbagai jenis kemiskinan mulai dari kemiskinan absolut, relatif, struktural, serta kultural semuanya termasuk sebuah kondisi penghalang untuk masyarakat dapat berkembang dan merasakan kenyamanan dalam hidup.

1.6.2 FAKTOR- FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN PERDESAAN

Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya kemiskinan dijelaskan dalam paradigma atau *grand theory* demokrasi sosial. Demokrasi sosial muncul sebagai wujud pengalaman sejarahnya terhadap kekurangannya serta kontradiksi libertarian di abad ke-19an. Demokrasi sosial berupaya memperbaiki dan mengakomodasi dua buah pemikiran ideologi sebelumnya yaitu pertama, kapitalisme yang bersifat eksploitatif dan terbuka. Kedua, sosialisme yang bersifat tertutup dan anti eksploitasi. Bernstein telah berargumentasi sejak tahun 1898 dalam bukunya *The Preconditions of Socialism* bahwa ide- ide Marxisme secara empiris tidak tepat (Thompson, 2009: 94). Cheyne, O'Brien serta Belgrave memaparkan teori demokrasi sosial dengan begitu memberikan kritik terhadap sistem pasar bebas, akan tetapi tidak melihat sistem kapitalis dengan suatu sistem yang wajib ditiadakan, sebab masih dipandang dengan bentuk organisasi

perekonomian secara efektifnya (Febriyanti, 2015: 73). Demokrasi sosial mencoba mengadopsi kebebasan dari kapitalisme dan mengadopsi prinsip keadilan dalam sosialisme (Warganegara, tanpa tahun: 1). Demokrasi sosial pada dasarnya terbagi atas dua konsep yaitu demokrasi sosial klasik dan konsep demokrasi sosial baru. Eduard Bernstein merupakan tokoh demokrasi sosial klasik. Kelanjutan demokrasi sosial diperbaharui oleh Giddens sebagai pemikir demokrasi sosial baru. Pada akhir tahun 1990-an Anthony Giddens membuat sebuah buku dengan berjudul “*The Third Way: The Renewal of Social Democracy*”. Dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam kapitalisme dan pasar harus ada intervensi negara (Giddens, 1999). Sedikitnya terdapat sepuluh ide dalam demokrasi sosial baru, diantaranya :

1. Pusat dari suatu radikal (*The radical centre*).
2. Negara demokrasi baru dan negara dengan tidak adanya musuh (*The state without enemies*).
3. Keluarga yang berdemokratis (*The democratic family*).
4. Kesamaan sebagai suatu inklusi (*Equality as inclusion*).
5. Masyarakat sipil secara aktif (*Active civil society*).
6. Ekonomi campuran baru (*The new mixed economy*).
7. Negara memberikan investasi sosialnya (*The social investment state*).
8. Kesejahteraan positif (*Positive welfare*).
9. Bangsa yang tergolong kosmopolitan (*The cosmopolitant nation*).
10. Demokrasi yang tergolong kosmopolitan (*The cosmopolitant democracy*) (Giddens:1999).

Kemudian, Thomas H. Marschall mengungkapkan bahwa demokrasi sosial adalah mengenai kewarganegaraan sosial (Meyer, 2008: 15). Hal tersebut diperkuat dengan pendapat (Meyer, 2008: 18) yang mengungkapkan bahwa :

“Demokrasi sosial biasanya dicirikan dengan negara yang memiliki kesejahteraan sosial komprehensif, yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar, pemerintahan memiliki komitmen untuk menjamin kesetaraan kesempatan dan keadilan, tidak hanya dalam bidang politik namun juga di dalam kehidupan ekonomi dan sosial.”

Menurut Thomas Meyer, demokrasi sosial memiliki argumentasi, diantaranya:

1) Berbagai Hak Asasi Dasar

Hak tersebut terdiri atas lima kelompok diantaranya hak sipil, sosial, politik, budaya serta ekonomi. Ide dibalik berbagai hak itu yakni bagaimana memperoleh kesempatan serta kebebasan masyarakat untuk terus berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

2) Negara yang Menjamin Kesejahteraan dengan Berbasis Hak

Suatu negara memiliki kewajiban mempertahankan martabat masyarakat pada konteks sosial maupun ekonominya. Negara harus mampu memberikan jaminan kesetaraan keadilan serta kesempatan baik dalam bidang politik maupun pada bidang sosial serta ekonominya. Seperti memberikan perlindungan masyarakat terhadap kemiskinan serta menyediakan pelayanan sosial.

3) Ekonomi Pasar Sosial dimana Diatur oleh UU

Dalam demokrasi sosial, tujuan mendasar dari ekonomi politik guna mewujudkan harmoni pada suatu operasi pasarnya yang tetap memperhatikan pemerintah dengan kebijakannya.

4) Demokratisasi Masyarakat serta Partisipasi

Peran aktif masyarakatnya serta jaminan atas kebebasan berpendapat menjadi aspek penting untuk mencapai integritas politik dan mendorong kesejahteraan(Meyer, 2008: 13-26).

Demokrasi sosial memegang nilai- nilai dasar yaitu kebebasan, partisipasi, keadilan, dan kesetaraan (Gombert, 2010). Menurut Meyer, dalam demokrasi sosial negara memiliki kewajiban bertindak, diantaranya :

1. Pembukaan akses, menjamin insfrastruktur publik maupunpemenuhan kebutuhan kehidupannya.
2. Penyediaan peluang dalam berpartisipasi aktif masyarakat melalui sistem pemerataan demokrasi serta sosialnya.
3. Mempertahankanperekonomian pasarnya dengan begitu kepentingan kaum buruh terlindungi (Gombert, 2010: 105).

Penyebab kemiskinan dijelaskan dalam teori demokrasi sosial. Paradigma tersebut tidak memandang suatu kemiskinan sebagai masalah seseorang, akan tetapi kepada masalah strukturalnya (Cheyne, O'Brien serta Belgrave 1998; Febrianti, 2015: 73). Berikut adalah tabel tentang kemiskinan dalam demokrasi sosial :

Tabel 1.3 Demokrasi Sosial tentang Kemiskinan

Paradigma	Demokrasi Sosial
Landasan Teori	Struktural
Konsep serta Indikator Kemiskinan	Kemiskinan Relatif
Penyebab Kemiskinan	Ketimpangan struktur perekomian serta politik; tidak adilnya ranah sosial; kurangnya intervensi pemerintah
Strategi Penanggulangan Kemiskinan	Proses menyalurkan pendapatan dasar yang dilakukan universal; perubahan fundamental pada berbagai pola dalam mendistribusikan pendapatannya dengan campur tagan negara maupun kebijakan sosialnya.

Sumber : Cheyne,O`Brien dan Belgrave,1998 dalam Roostartina (2013)

Berdasarkan tabel 1.1, terlihat bahwa demokrasi sosial lebih menekankan dimana sebuah kemiskinan merupakan akibat dari kurangnya akses yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya dalam pemenuhan kesejahteraan, adanya ketimpangan dan ketidakadilan pada masyarakatnya mencakup pada bidang politik maupun ekonomi. Bagi demokrasi sosialnya terkuncinya berbagai akses untuk suatu kelompok yang menjadi faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan kebebasan (Febrianti, 2015: 73). Menurut Syahyuti, teori demokrasi sosial juga menekankan adanya kesetaraan sebagai syarat yang penting untuk mendapatkan suatu kebebasan serta kemandirian (Febrianti, 2015: 73). Kebebasan dan kemandirian masyarakat akan tercapai jika mampu mencapai berbagai sumber untuk potensi dirinya kesehatan, pendidikan serta pendapatan dengan kecukupannya (Febrianti, 2015: 73). Dari hal tersebut, maka peran negara dalam pendekatan ini sangat dibutuhkan untuk membuat strategi dalam penanggulangan kemiskinan.

Menurut Jhingan, terdapat tiga karakteristik utama Negara berkembang yang jadi pemicu serta sebagai akibat yang terpaut pada kemiskinan:

1. Prasarana serta fasilitas pembelajaran yang tidak mencukupi sehingga menimbulkan naiknya total penduduk yang mengalami buta huruf serta tidak mempunyai keterampilan maupun kemampuan.
2. Pola konsumsi serta fasilitas kesehatan kurang baik sehingga cuma minoritas penduduknya menjadi tenaga kerja yang produktif.

3. Penduduk yang terkonsentrasikan pada zona pertambangan serta pertanian melalui tata cara penciptaan dimana sudah usang serta tertinggal oleh kemajuan zaman (Tisniwati, 2012:36).

Terdapat beberapa perihal yang dapat mengakibatkan individunya tergolong “kategori miskin”. World Bank menjelaskan terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, mencakup :

1. Pendapatan beserta aset yang masih rendah dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya misal tempat tinggal, makanan, pakaian, pendidikan maupun kesehatan.
2. Tidak adanya kemampuan dalam mengemukakan suaranya serta ketiadaan kekuatan pada institusi negara maupun masyarakatnya
3. Rentan terguncang dalam hal perekonomian berkaitan terhadap tidak mampu dalam mengatasi hal itu.

Bank Dunia mempunyai beberapa indikator kemiskinan mencakup:

1. Keterbatasan terhadap kepemilikan tanah maupun modal
2. Keterbatasan sarana maupun prasarana yang diperlukan
3. Biasanya pembangunan pada kota
4. Kesempatan yang tidak sama antar masyarakatnya
5. Sumber daya manusia serta sektor perekonomian yang tidak sama
6. Produktivitas yang masih rendah
7. Kurang baiknya budaya hidup
8. Kurang baiknya tata pemerintahannya
9. Berlebihan dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa faktor penyebab kemiskinan tidak dapat dipandang sekadar pada satu sisinya, sebab kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks. Faktor penyebab kemiskinan bisa disebabkan karena kurangnya fasilitas (pembelajaran dan kesehatan) yang diperoleh masyarakat hingga masyarakat yang terkonsentrasi di zona pertanian seperti yang diungkapkan oleh Jhingan. Disisi lain, rendahnya pendapatan, kurangnya partisipasi publik, serta guncangan ekonomi juga bisa menjadi penyebab kemiskinan seperti yang dijelaskan oleh World Bank. Dalam paradigma demokrasi sosial, faktor penyebab kemiskinan secara garis besar, ialah pada struktur, institusi, ketidakadilan, ketimpangan, dan tertutupnya akses- akses warga dalam memperoleh sumber kemampuan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma atau *grand theory* demokrasi sosial untuk meneliti faktor- faktor apa saja sebagai penyebab tingkat kemiskinan di Desa Purwosari. Sebab, melalui demokrasi sosial dapat membantu menganalisis bahwa pangkal penyebab kasus kemiskinan tidak hanya dilihat dari satu sisi semata, namun bagaimana struktural serta institusi/lembaga dalam masyarakat juga memegang peran penting didalamnya terutama dalam menjamin hak- hak masyarakat dan menciptakan keadilan. Struktur atau tatanan sosial dalam masyarakat sudah sepantasnya bersikap dan bertindak untuk kebaikan bersama, memberikan peluang dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan seperti mendapatkan sumber-sumber pendapatan. Begitupun pemerintah, perannya sangat penting untuk dapat memberikan kebijakan – kebijakan serta berbagai bentuk bantuan untuk masyarakat miskin. Pemerintah tidak hanya bekerja untuk memenuhi tanggung jawabnya semata, namun juga harus memberikan

kontribusi nyata dalam upaya menanggulangi permasalahan kemiskinan dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

1.7 OPERASIONAL KONSEP

Penulis menggunakan konsep utama yaitu paradigma atau *grand theory* demokrasi sosial yang menggunakan lima konsep penyebab kemiskinan (struktur sosial, institusi/lembaga, ketidakadilan, ketimpangan, dan tertutupnya akses- akses dalam memperoleh sumber kemampuan) dalam menjawab rumusan masalah sebagai acuan dalam menentukan ruang lingkup atau batasan-batasan penelitian yang dilaksanakan terutama dalam mencari data guna memperkuat gagasan penulis dalam menjawab inti permasalahan yang terdapat dalam karya ilmiah. Berikut adalah operasional konsepnya :

Konsep dan Definisi Konsep	Indikator	Sub Indikator
Struktur Sosial Struktur sosial yaitu beberapa bagian ataupun unsurnya pada warganya yang saling berinteraksi dan menjadi pedoman bagi tingkah laku seseorang. Struktur sosial yang bisa menjadi faktor	Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial yaitu suatu bentuk struktur sosial yang ada pada masyarakat dimana memiliki nilai berbeda pada setiap tingkatan atau lapisan. Stratifikasi yang bisa menghambat kemajuan	Stratifikasi sosial tertutup yaitu individu tidak memungkinkan untuk berpindah posisi dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Seperti adanya sistem kasta (Sudra, Waisya, Ksatria, Brahmana), sehingga menghambat individu meningkatkan kualitas kehidupannya.

penyebab kemiskinan adalah stratifikasi sosial maupun tatanan sosialnya.	masyarakat adalah stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi kekayaan/ ekonomi.	Adanya stratifikasi kekayaan/ ekonomi yaitu golongan bawah (buruh tani), golongan menengah (pegawai kantor, petani, pedagang), golongan atas (orang kaya, pengusaha, penguasa) yang membuat masyarakat lebih menghargai dan menghormati golongan yang kaya dan memungkinkan adanya konflik antar golongan.
	Tatanan sosial. Tatanan sosial merupakan cara masyarakat bekerja sama agar tercipta keadaan yang stabil tanpa kekacauan dan pergolakan	Bentuk tidak mematuhi tatanana sosial seperti melanggar hukum, melanggar aturan, berperilaku tidak sesuai norma yang berlaku, serta melakukan tindak kriminal (pencurian, pembunuhan, dll).
Institusi/lembaga Institusi atau lembaga merupakan sebuah tempat dalam mengembangkan suatu fungsi maupun tugasnya guna meraih tujuannya. Dalam hal ini adalah lembaga desa yakni : Pemerintah Desa; Badan Permusyawaratan Desa (BPD);	Pemerintah Desa. Pemerintah Desa ialah penyelenggara suatu urusan pemerintah serta kepentingan wargasekitarnya.	Kemampuan Pemerintah Desa dalam membagikan jaminan atas beberapa hak warga (beberapa hak sipil, sosial, ekonomi, politik serta budayanya.
	Pemerintah Desa terdiri atas Kepala dan Perangkat Desanya.	Perumusan strategi , program-program bantuan dan jaminan sosial dalam penanggulangan kemiskinan.
	Jika dalam suatu daerah masih terjadi kemiskinan maka	Pembagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) dinilai seimbang

Lembaga kemasyarakatan; dan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes).	kinerja dari pemerintah desa setempat patut untuk disalahkan dan dipertanyakan.	diantara bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan masyarakat desa, Pembangunan Desa, serta bidang penanggulangan bencana, mendesak desa, keadaan darurat.
		Kualitas pemerintah desa ketikamelaksanakan layanan publik (layanan barang publik, layanan jasa publik, layanan administrasi)
		Kemampuan pemerintah dalam mendukung dan menumbuhkan keaktifan partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan kepentingannya. Misalnya dengan adanyaMusyawarah Desa, Musyawarah Dusun, serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
	Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD ialah suatu lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dimana anggota di dalamnya termasuk wakil dari penduduk desanya	Lembaga tersebut memiliki peran penting untuk mengekspresikan kepentingan masyarakat lokal dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi maupun tugasnya (menampung, menggali, mengelola, serta menyalurkan aspirasi dari masyarakatnya).

	sesuai dengan keterwakilannya suatu wilayah serta ditetapkan dengan berdemokratis.	
	Lembaga kemasyarakatan (LKD) LKD ialah suatu wadah partisipasi warga yang berperan selaku mitra Pemerintah Desa.	Kinerja LKD dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, meningkatkan pelayanan masyarakat Desa, dan melakukan pemberdayaan masyarakat.
	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BUMDes merupakan badan usaha yang semua ataupun mayoritas dari modalnya dimiliki oleh desa yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan untuk pengelolaan aset, jasa layanan serta usaha lain guna kesejahteraan masyarakat desanya.	Kemampuan BUMDes dalam mengoptimalkan potensi SDA guna kebutuhan masyarakatnya, serta mengoptimalkan dan menciptakan pemerataan ekonomi masyarakat desanya.
Ketidakadilan Ketidakadilan yaitu saat individu atau suatu kelompok masyarakat diperlakukan	Bentuk dari tidak adilnya dalam masyarakat dimana bisa menjadi faktor penyebab kemiskinan	Stereotip yang menimbulkan ketidakadilan adalah stereotip negatif yaitu bentuk pemberian sifat nilai atau prasangka negatif terhadap kelompok

sewenang- wenangnya. Perlakuan tersebut juga berkaitan dengan permasalahan pembagian sesuatu terhadap hak individunya ataupun kelompoknya dimana dilaksanakan dengan tidak proporsional.	dapat berupa Stereotip, Marginalisasi, dan Dominasi.	tertentu yang dilakukan secara subjektif(ras, jenis kelamin, agama, dll).
		Marginalisasi yaitu terjadi peminggiran atau pembatasan peran terhadap kelompok tertentu dalam lembaga sosial utama. Masyarakat yang termarginalisasi akan kesulitan hidup secara produktif, sehat, dan sulit berkembang. Marginalisasi bisa terjadi pada bidang (profesi, kesehatan, agama, etnis, politik, dan ekonomi)
		Dominasi yaitu kondisi dimana suatu kelompok masyarakat bergantung pada kelompok lainnya yang menjadi pemegang kekuasaan sewenang- wenangnya terhadap kelompoknya sehingga bisa menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan hak dan pengakuannya. Dominasi bisa terjadi pada bidang (politik, ekonomi, budaya, agama, dan kehidupan sosial)
Ketimpangan Ketimpangan merupakan kondisi	Faktor internal ketimpangan yang	Faktor dari dalam biasanya disebabkan karena kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

yang terjadi di tengah masyarakat yang biasanya terjadi karena adanya perbedaan status sosial, perekonomian, maupun budaya yang melekat. Ketimpangan berarti juga adanya jurang pemisah dan ketidakseimbangan kehidupan masyarakat.	asalnya dari dalam diri individu.	yang rendah. Seperti tingkat pendidikannya, dan kesehatannya yang rendah.
	Faktor Eksternal Ketimpangan berasal dari luar kemampuan seseorang.	Faktor eksternal biasanya disebabkan oleh birokrasi ataupun kebijakan pemerintahan dimana memberikan batasan pada akses individu. Seperti kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada masyarakat miskinnya, ketersediaan lapangan kerja yang sedikit, dan pembangunan infrastruktur yang kurang merata.
Tertutupnya akses dalam memperoleh sumber kemampuan Tertutupnya akses dalam memperoleh sumber kemampuan yakni keadaan masyarakatnya yang tidak mempunyai peluang memperoleh sumber dayanya serta pada upaya meningkatkan kapabilitas diri.	Aset fisik	Aset fisik merupakan aset yang berwujud seperti adanya berbagai infrastruktur yang dimiliki desanya guna membantu kehidupan masyarakatnya supaya lebih baik. (sarana pendidikan, sarana kesehatan, pasar/mall).
	Aset SDM	Aset SDM adalah aset berharga yang menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan suatu daerah. (total penduduk, tingkat pendidikan, perkembangan, serta mata pencahariannya).
	Aset finansial	Aset finansial merupakan aset dasar yang ada

		padaarganyasupaya dikelolaguna mewujudkan kesejahteraan warganya (koperasi, BUMdes, lumbung pangan serta kelompok arisan)
	Aset lingkungan	Aset lingkungan ialah aset yang didasarkan denganSDA yang ditemukan pada masing-masingdaerah. (lahan pertanian dan perkebunan)

1.8 METODE PENELITIAN

Penelitian adalah serangkaian usaha atau kegiatan guna menyelesaikan suatu permasalahan yang dilakukan secara sistematis serta mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tertentu. Menurut Sekaran (Raco, 2010: 5) memberikan definisi penelitian dengan aktivitas yang terorganisir, dengan memakai data, sistematis, dilaksanakan dengan objektif, kritis, ilmiah guna memperoleh suatu pemahaman secara lebih dalam terhadap suatu permasalahan. Dalam melakukan penelitian, prosedur yang diterapkan disesuaikan serta saling mendukung antar langkahnya supaya dihasilkan suatu simpulan secara baik dan benar. Metode penelitian berkaitan dengan bagaimana penulis dapat mencapai suatu tujuan dengan menggunakan berbagai langkah mulai dari mencari data, merumuskan, hingga Menyusun suatu laporan. Peneliti memakai prosedur pada proses penelitiannya dengan serangkaian aktivitas mencakup:

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian dirancang dengan desain penelitian memakai metode kualitatif. Dari metode kualitatif akan diperoleh data deskriptif. Penelitian ini akan menghasilkan data berupa hasil analisis serta deskriptif yang berdasarkan atas pendapat dari peserta penelitian atau partisipan baik lisan maupun tertulis, tingkah laku yang dapat diobservasi serta beberapa data pendukung. Menurut (Creswell, 2008., dalam Raco, 2010: 7) memaparkan definisi penelitian kualitatif ialah pendekatan ataupun proses penyelidikan dalam melakukan eksplorasi serta pemahaman mengenai gejala sentralnya. Metode tersebut menempatkan partisipannya benar-benar selaku subjeknya dan bukan suatu objeknya, metode penelitian ini memberikan ruang yang sangat besar kepada partisipan. (Raco, 2010: 7). Adapun penelitian kualitatif deskriptif bisa menyesuaikan gagasan antara peneliti terhadap informannya. Penentuan metode tersebut dilaksanakan sebab dapat mendeskripsikan seluruh fenomena yang terdapat di masyarakat secara lebih jelas, tidak hanya menghasilkan analisis berupa angka. Data yang didapat nantinya dipaparkan berbentuk deskripsi memakai kalimat yang dengan mudahnya dipahami. Penulis menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif, dikarenakan hal itu selaras terhadap tujuan penelitian ini, yaitu untuk menggambarkan hasil analisis mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan di Desa Purwosari Kabupaten Wonosobo.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian ialah wilayah ataupun tempat yang dijadikan untuk melakukan penelitian. Adapun penelitian tersebut mengambil lokasi di Desa

Purwosari Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah. Fokus latar penelitiannya di kantor Pemerintahan Desa Purwosari.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek yang menjadi sasaran untuk diteliti oleh orang yang melakukan penelitian disebut subjek penelitian (Arikunto, 2006: 145). Subjek pada penelitian ini yaitu Kepala Desa Purwosari dan Perangkat Desa Purwosari.

Teknik yang dipergunakan pada subjek penelitian ialah wawancara secara lebih dalam (*In-depth Interview*) melalui pemberian pertanyaan yang diajukan pada peserta penelitian atau partisipan pada lokasi penelitiannya. Pada penelitian yang dilaksanakan, teknik dalam menentukan informan yang dipilih yakni *purposive sampling*. Teknik tersebut dipakai dengan mengambil sumber data melalui suatu pertimbangan. Pertimbangan tersebut contohnya seseorang yang dianggap paling tahu mengenai apa yang diharapkan, ataupun mungkin selaku penguasa dengan demikian akan mempermudah peneliti dalam mendalami objek situasi sosial yang akan dijadikan subjek penelitiannya (Sugiyono, 2013: 219). Teknik purposif sampling dilaksanakan melalui pengambilan subjek penelitiannya serta bukan berdasarkan dengan random, strata ataupun daerahnya namun atas suatu tujuannya (Arikunto, 2006: 145). Teknik ini memiliki kelebihan sebab dapat menggabungkan minat dan kebutuhan yang berbeda-beda dan dapat mengurangi bias informasi. Pada penelitian ini digunakan informan dimana terlibat secara langsung meliputi :

1. Bapak Jumadi selaku Kepala Desa Purwosari.
2. Bapak Waluyo selaku Kepala Seksi (KASI) Pemerintahan Desa Purwosari.
3. Bapak Supriyadi selaku Sekretaris Desa Purwosari

4. Bapak Choerul Anam selaku Kepala Seksi (KASI) Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Purwosari
5. Bapak Siswo Suparto selaku Kepala Urusan (KAUR) Umum dan Perencanaan Desa Purwosari
6. Bapak Aji Setiawan selaku Kepala Urusan (KAUR) Keuangan Desa Purwosari
7. Bapak Nurhamim selaku Kepala Dusun 1 mencakup satu dusun (Dusun Lembana)
8. Bapak Sabarudin selaku Kepala Dusun 2 mencakup dua dusun (Dusun Lembosari dan Bugangan)
9. Ibu Tuni Supardio selaku Kepala Dusun 3 mencakup dua dusun (Dusun Kerodan dan Pagerkeji).

1.8.4 Jenis Data

Metode penelitian yang dipergunakan oleh peneliti ketika melaksanakan penelitian ialah kualitatif. Metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada pengamatan terhadap suatu fenomena. Penelitian kualitatif berguna untuk memahami kejadian, fakta, gejala, peristiwa, masalah ataupun realita serta bukan guna mempelajari ataupun melakukan pembuktian terhadap korelasi sebab akibat dari permasalahan ataupun kejadian (Raco, 2010: 106-107). Pada penelitian ini, peneliti berada pada suatu situasi sosial melaksanakan pengamatan serta wawancara bersamaseseorang yang dipandang mengetahui terkait dengan situasi sosialnya (Sugiyono, 2013: 216). Selain itu, sumber data tertulisnya bisa didapatkan dari dokumen serta arsip resmi yang dipunyai oleh partisipannya.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data ialah bagaimana subyek diperoleh dalam penelitian. Sumber data menjadi hal yang cukup penting dalam melakukan penelitian. Menurut Lofland, dalam (Moleong, 2000: 112) mengatakan yakni sumber data utamanya pada penelitian kualitatif berupa kumpulan kata, maupun tindakan selebihnya ialah data tambahan misalnya dokumen ataupun yang lainnya. Selanjutnya, pada penelitian ini penulis memakai dua sumber data diantaranya :

- a. Sumber data primer, yakni sumber data dimana secara langsung memberikan data pada peneliti dari sumber pertama. Data primer bertujuan untuk lebih mengetahui dengan lebih dalam berbagai faktor yang mengakibatkannaiknya angka kemiskinan di Desa Purwosari dengan demikian dapat dibandingkan antara hasil data dari subjek penelitiannya terhadap keadaan yang ada. Data primer didapatkan dari Kepala Desa Purwosari, Perangkat Desa Purwosari serta jika dibutuhkan sebagian masyarakat Desa Purwosari.
- b. Sumber data sekunder, yakni sumber yang tidak langsung menyediakan data pada peneliti, contohnya dengan dokumen, yang dipergunakan untuk penunjang sumber pertamanya. Dalam penelitian ini, data sekunder idapatkan dari dokumen, tulisan, arsip-arsip, gambar serta berbagai data pendukung lainnya yang terdapat pada lembaga/instansi terkait yaitu di Desa Purwosari.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara yang dipergunakan dalam mendapatkan berbagai data yang dibutuhkan saat melaksanakan penelitian. Teknik

tersebut termasuk langkah yang dinilai sangat strategis pada penelitian, sebab tujuan utamanya yakni didapatkannya suatu data (Sugiyono, 2013: 224). Pada penelitian ini memakai teknik data triangulasi. Triangulasi didefinisikan dengan teknik dalam mengumpulkan data yang sifatnya mengkombinasikan dari berbagai teknik pengumpulan datanya dengan sumber data yang sudah diperolehnya (Sugiyono, 2013: 241). Antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara mendalam (*Depth Interview*)

Pada wawancara mendalam peneliti bukan hanya sekedar memberikan pertanyaan, tetapi memperoleh definisi tentang pengalaman hidup dari informan secara lebih mendalam (Moleong, 2000). Melalui wawancara yang mendalam peneliti akan memperoleh arti yang diceritakannya dengan pengalaman yang dimiliki (Raco, 2010: 117). Peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala Desa Purwosari dan Perangkat Desa Purwosari yang berhubungan erat dengan penelitian yang dilakukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu usaha guna mencari dan memperoleh dokumen yang berisikan berbagai arsip, tulisan, gambar serta lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Purwosari. Studi dokumen merupakan pelengkap, pendukung, dan dapat meningkatkan kredibilitas dari pemakaian metode pengamatan serta wawancara pada penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013: 240).

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Teknik untuk menganalisis data ialah sesuatu proses pengumpulan informasi yang dilakukan secara sistematis oleh guna mendapatkan sesuatu

kesimpulan. Analisis data pada dasarnya dicoba diseluruh rangkaian proses penelitian secara terus menerus baik saat sebelum terjun ke lapangan sampai berlangsung terus hingga berakhir penelitian. Akan tetapi, dalam teknik analisis penelitian kualitatif, umumnya lebih difokuskan sepanjang proses di lapangan bertepatan dengan pengumpulan informasi. Menurut Miles and Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2013: 246), memaparkan bahwa ketika melakukan teknik tersebut dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif erta berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, dengan demikian datanya telah jenuh. Miles and Huberman menjelaskan tiga alur kegiatan dalam analisis data kualitatif, diantaranya :

a) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses berfikir peneliti untuk merangkum, mencari inti pokok, membuat kategorisasi, menemukan hal-hal penting dalam sebuah penelitian. Dari hal tersebut maka, reduksi data sangat bermanfaat untuk membagi cerminan yang secara lebih jelas, dan mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data, tiap peneliti tentu harus berpegang pada apa yang akan dicapai. Dalam penelitian kualitatif penemuan merupakan tujuan yang akan diwujudkan. Oleh sebab itu, jika peneliti dalam melaksanakan penelitian, menciptakan suatu yang ditatap asing, tidak diketahui, belum memiliki pola, malah seperti itu yang wajib dijadikan atensi peneliti dalam mereduksi data. Reduksi data membutuhkan metode pemikiran yang cukup kritis, sensitif yang memerlukan suatu kecerdasan dan kedalaman pengetahuan yang lumayan besar. Bagi peneliti yang

masih baru, dalam mereduksi informasi dapat mendiskusikan pada teman ataupun orang yang lainnya yang dianggap sudah cukup ahli.

b) Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap berikutnya sesudah mereduksi data yakni melakukan data display. Display data memberikan informasi yang tersusun dalam memberikan penyajian data sehingga nantinya dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam, merencanakan kerja selanjutnya dan dipergunakan sebagai acuan dalam mengambil tindakan sesuai dengan sajian data tersebut. Dalam melaksanakan data display pada penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan membuat uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Pada hal ini Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2013: 249) memaparkan “*the most frequent form of display data for qualitative reserch data in the past has been narrative tex*”. Dimana berarti seringkali dipakai dalam melakukan penyajian menyajikan data yaitu menggunakan teks yang sifatnya naratif.

c) Kesimpulan Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Tahap ke tiga untuk menganalisis data kualitatif yakni menarik kesimpulan serta memverifikasi. Dengan demikian simpulan pada penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan permasalahan yang ditetapkan semenjak awal, akan tetapi dapat juga tidak, karena masalah serta rumusan permasalahan pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara serta dapat berubah apalagi apabila tidak buktinya secara kuat di lapangan. Akan tetapi jikasimpulan yang dikemukakan dalam tahap awal, didukung oleh bukti- bukti yang valid serta tidak mengalami perubahan dikala peneliti kembali ke lapangan saat pengumpulan data, maka simpulan yang dipaparkan termasuk simpulan yang kredibel. Data display yang didukung oleh

berbagai data yang berbobot, maka dapat dipakai untuk simpulan yang kredibel. Data didapatkan dari wawancara terhadap subjek tertentu serta dari dokumen ataupun arsip berarti yang berkaitan terhadap penelitian yang diteliti. Pengumpulan data dicoba secara terus-menerus melalui wawancara secara mendalam serta dokumentasi dengan demikian data yang terkumpul menjadi banyak.

1.8.8 Kualitas Data

Guna meyakinkan keabsahannya dari data kualitatif maka dibutuhkan validitas serta reliabilitas. Validitas serta reliabilitas mengacu pada permasalahan mutu data serta ketepatan metode yang dipergunakan buat melakukan proyek penelitian. Mutu data serta ketepatan metode sangatlah berarti dalam melakukan suatu penelitian. Validitas ialah bagaimana kemampuan untuk menciptakan derajat ketepatan antara data yang terjalin pada obyek penelitian dengan data yang bisa dilaporkan oleh peneliti. Melakukan validasi hasil penelitian artinya peneliti melakukan penentuan akurasi dan kredibilitas hasil melalui strategi yang tepat, seperti lewat triangulasi (*member checking*) (Raco, 2010: 133). Dalam memandang reliabilitas dalam penelitian kualitatif, sesuatu kenyataan ditatap mempunyai sifat majemuk ganda, tetap berubah, tidak konsisten, serta berulang seperti semula. Dalam melaksanakan uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa cara ialah kredibilitas (*validity* internal), Transferabilitas (*validity* eksternal), Dependabilitas (*dependability*), dan konfirmabilitas (*confirmability*).

Pertama, kredibilitas (*validity* internal). Dalam melakukan pengujian kredibilitas data ataupun kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif bisa dilaksanakan melalui cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif,

serta membercheck atau proses pengecekan data yang didapatkan peneliti pada orang yang memberikan data (Sugiyono, 2013: 270). Dalam perihal ini, teknik yang hendak digunakan untuk menguji keabsahan data lewat teknik triangulasi data. Triangulasi pada uji kredibilitas ini dimaknai bagaikan suatu cara mengecek keabsahan data yang memakai suatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan dari bermacam sumber melalui bermacam cara, serta bermacam waktu dan sebagai pembandingan terhadap informasi tersebut. Maka ada yang disebut dengan, triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, serta triangulasi waktu:

- 1) Triangulasi Sumber. Triangulasi sumber dicoba dengan cara mengecek data yang sudah diperoleh lewat sebagian sumber. Perolehan sebagian sumber tersebut dideskripsikan dan dikategorisasikan. Dari perihal tersebut, hendak menciptakan sesuatu kesimpulan yang pada tingkatan berikutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) oleh sumber data tersebut.
- 2) Triangulasi Teknik. Triangulasi teknik dicoba dengan cara mengecek data kepada sumber teknik yang berbeda. Sebagai contoh, data yang diperoleh dengan wawancara, setelah itu dicek dengan dokumentasi. Apabila pada kesimpulannya, menciptakan informasi yang berbeda-beda, maka peneliti wajib melaksanakan dialog lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan guna membenarkan data mana yang benar.
- 3) Triangulasi Waktu. Triangulasi waktu cukup mempengaruhi terhadap kredibilitas data. Dalam rangka pengujian kredibilitas data bisa dicoba dengan cara melaksanakan pengecekan dengan wawancara ataupun teknik lain dalam waktu ataupun suasana yang berbeda. Apabila hasil uji

menciptakan data yang berbeda, maka dicoba secara berulang-ulang sehingga hingga ditemui kepastian datanya.

Kedua, transferabilitas (*validitas eksternal*). Transferabilitas dalam penelitian kualitatif bermanfaat untuk membuat laporan yang dijabarkan secara rinci, jelas, sistematis, serta bisa dipercaya. Perihal tersebut dicoba guna memastikan pembaca ataupun orang lain bisa memahami dengan jelas hasil penelitian tersebut, sehingga bisa memutuskan bisa ataupun tidaknya buat mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

Ketiga, dependabilitas (*dependability*). Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan melalui cara audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh pembimbing untuk mengaudit keseluruhan kegiatan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Dalam proses audit, peneliti wajib menampilkan bagaimana peneliti mulai menentukan fokus permasalahan, memasuki lapangan, memastikan sumber data, melaksanakan analisis data, melaksanakan uji keabsahan data, hingga pada membuat kesimpulan.

Terakhir, konfirmabilitas (*confirmability*). Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* cukup mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya bisa dicoba secara bersamaan. Melaksanakan uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang tidak dapat terlepas dari kaitannya dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan tujuan dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut sudahenuhi standar *confirmability*.